



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 1087/BP/PW.1.1.1/IX/2024

TENTANG

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

SECARA MANDIRI

TAHUN 2024

Sehubungan dengan Pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju WBK secara Mandiri, dengan ini Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi perkembangan Zona Integritas Menuju WBK secara mandiri telah dilaksanakan sejak tanggal 12 s.d 16 Agustus 2024 berdasarkan usulan dan data unit kerja yang telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3012/SEK/OT1/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 Hal Pengajuan Usulan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Evaluasi Mandiri;
2. Hasil seleksi administrasi merujuk pada syarat pengusulan dan syarat penetapan Zona Integritas sebagaimana tercantum pada:
 - a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah;
 - b. Keputusan Menteri PANRB Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (*Pilot Project*) Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*);
 - c. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 03 Tahun 2024 tentang Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri ZI Tahun 2024.
3. Hasil seleksi administrasi sebagaimana terlampir pada Lampiran I dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Lulus dan Tidak Lulus;
4. Setiap Unit Kerja yang dinyatakan Lulus akan dilanjutkan ke tahap analisis dokumen;
5. Setiap unit kerja yang dinyatakan Tidak Lulus, tidak dilanjutkan ke tahap analisis dokumen, namun apabila terdapat keberatan terhadap hasil seleksi administrasi, maka unit kerja dapat mengajukan sanggahan sebagaimana terlampir pada Lampiran II pengumuman ini;
6. TPI dapat menerima atau menolak sanggahan dari satuan kerja untuk kategori Tidak Lulus berdasarkan hasil Verifikasi bukti yang disampaikan;
7. Pengumuman hasil sanggahan dan kelulusan hasil tindak lanjut seleksi administrasi akan diumumkan selambat-lambatnya pada 9 September 2024.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut terkait pengumuman ini, dapat menghubungi Sdri. Ines (0878-8299-6605) atau Sdr. Arief (0856-4211-1177).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 03 September 2024
Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,

Ditandatangani Secara Elektronik



Sugiyanto

Lampiran I
Pengumuman Nomor: 1087/BP/PW.1.1.1/IX/2024
Tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) secara Mandiri Tahun 2024

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

A. UNIT KERJA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

1. Unit Eselon 1

No	Nama Unit Kerja
1	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

2.a. Lingkungan Peradilan Umum - Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2	Pengadilan Tinggi Banten
3	Pengadilan Tinggi Maluku Utara
4	Pengadilan Tinggi Palembang

2.b Lingkungan Peradilan Umum- Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Negeri Baubau
2	Pengadilan Negeri Bireuen
3	Pengadilan Negeri Boyolali
4	Pengadilan Negeri Kupang
5	Pengadilan Negeri Padang
6	Pengadilan Negeri Pekalongan
7	Pengadilan Negeri Putussibau
8	Pengadilan Negeri Ambon
9	Pengadilan Negeri Banjarbaru
10	Pengadilan Negeri Bengkalis
11	Pengadilan Negeri Blora
12	Pengadilan Negeri Bojonegoro
13	Pengadilan Negeri Bulukumba
14	Pengadilan Negeri Cianjur
15	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu

16	Pengadilan Negeri Gedong Tataan
17	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
18	Pengadilan Negeri Kab. Madiun
19	Pengadilan Negeri Kandangan
20	Pengadilan Negeri Ketapang
21	Pengadilan Negeri Manado
22	Pengadilan Negeri Ngabang
23	Pengadilan Negeri Pati
24	Pengadilan Negeri Probolinggo
25	Pengadilan Negeri Sei Rampah
26	Pengadilan Negeri Stabat
27	Pengadilan Negeri Tarakan
28	Pengadilan Negeri Wonogiri

3.a. Lingkungan Peradilan Agama - Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Tinggi Agama Jambi
2	Pengadilan Tinggi Agama Manado

3.b. Lingkungan Peradilan Agama - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja
1	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2	Mahkamah Syar'iyah Jantho
3	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
4	Pengadilan Agama Ambarawa
5	Pengadilan Agama Ampana
6	Pengadilan Agama Andoolo
7	Pengadilan Agama Arga Makmur
8	Pengadilan Agama Atambua
9	Pengadilan Agama Badung
10	Pengadilan Agama Bajawa
11	Pengadilan Agama Balikpapan
12	Pengadilan Agama Bangkalan
13	Pengadilan Agama Bangkinang

14	Pengadilan Agama Barabai
15	Pengadilan Agama Batang
16	Pengadilan Agama Batulicin
17	Pengadilan Agama Baubau
18	Pengadilan Agama Bawean
19	Pengadilan Agama Boyolali
20	Pengadilan Agama Bukittinggi
21	Pengadilan Agama Cianjur
22	Pengadilan Agama Donggala
23	Pengadilan Agama Garut
24	Pengadilan Agama Gedong Tataan
25	Pengadilan Agama Gianyar
26	Pengadilan Agama Giri Menang
27	Pengadilan Agama Jayapura
28	Pengadilan Agama Kayu Agung
29	Pengadilan Agama Kota Madiun
30	Pengadilan Agama Koto Baru
31	Pengadilan Agama Kuala Kapuas
32	Pengadilan Agama Kuala Pembuang
33	Pengadilan Agama Kudus
34	Pengadilan Agama Kupang
35	Pengadilan Agama Luwuk
36	Pengadilan Agama Manado
37	Pengadilan Agama Manna
38	Pengadilan Agama Merauke
39	Pengadilan Agama Mesuji
40	Pengadilan Agama Muara Tebo
41	Pengadilan Agama Nabire
42	Pengadilan Agama Pacitan
43	Pengadilan Agama Padang
44	Pengadilan Agama Palangkaraya

45	Pengadilan Agama Palopo
46	Pengadilan Agama Palu
47	Pengadilan Agama Pangkalan Balai
48	Pengadilan Agama Pematang Siantar
49	Pengadilan Agama Prabumulih
50	Pengadilan Agama Rangkasbitung
51	Pengadilan Agama Rengat
52	Pengadilan Agama Rumbia
53	Pengadilan Agama Sengeti
54	Pengadilan Agama Singkawang
55	Pengadilan Agama Sorong
56	Pengadilan Agama Sukabumi
57	Pengadilan Agama Sukoharjo
58	Pengadilan Agama Sungailiat
59	Pengadilan Agama Suwawa
60	Pengadilan Agama Tanjung Karang
61	Pengadilan Agama Tanjung Pandan
62	Pengadilan Agama Tanjung Pati
63	Pengadilan Agama Tembilahan
64	Pengadilan Agama Ternate
65	Pengadilan Agama Tilamuta
66	Pengadilan Agama Tondano
67	Pengadilan Agama Tuban
68	Pengadilan Agama Tulungagung
69	Pengadilan Agama Wonogiri

4. Lingkungan Peradilan Militer - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Militer I-03 Padang

5.a. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara - Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

5.b. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo
4	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
5	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
6	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
7	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

B. UNIT KERJA YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

1.a. Lingkungan Peradilan Umum - Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Tinggi Gorontalo	1. LKE Manual namun tidak ada catatan maupun link data dukung 2. Laporan survey menggunakan format lama IKM dan IPAK (tidak sesuai format SE Menpan No 4 Tahun 2023)
2	Pengadilan Tinggi Jayapura	- LKE Manual, namun nilai belum diisi dan belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
3	Pengadilan Tinggi Kupang	- LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id . Tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung. - Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan tidak ada laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, namun yang disampaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.
4	Pengadilan Tinggi Manado	- LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen - Terdapat 1 Aparatur terlambat melaporkan SPT Pajak 2023 yang baru dilaporkan 6 Mei 2024
5	Pengadilan Tinggi Padang	- LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id .

6	Pengadilan Tinggi Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> - LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen - Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survey Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
---	-----------------------------	---

1.b. Lingkungan Peradilan Umum - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Negeri Ende	<ul style="list-style-type: none"> - LKE menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen - Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survey Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas - TLHP belum 100%
2	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id - Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan tidak ada Laporan Hasil Survei sesuai format namun hanya informasi hasil survei
3	Pengadilan Negeri Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen - Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survey Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
4	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Laporan Survey menggunakan format lama (IKM dan IPAK) dan periode Survey TW I (Januari-Maret 2024)
5	Pengadilan Negeri Limboto	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung
6	Pengadilan Negeri Maumere	<ul style="list-style-type: none"> - Tautan Dokumen LKE tidak dapat diakses - Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan hanya Pelaporan SPAK saja dan tidak ada Laporan SPKP nya sehingga tidak sesuai dengan persyaratan format laporan survei.
7	Pengadilan Negeri Muara Teweh	<ul style="list-style-type: none"> - LKE Manual, namun tidak ada nilai - Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas

8	Pengadilan Negeri Pagar Alam	LKE Manual kosong, tidak ada catatan atau link data dukung
9	Pengadilan Negeri Palembang	- LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen; - Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survey Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
10	Pengadilan Negeri Purbalingga	Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survey Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
11	Pengadilan Negeri Sanggau	- LKE manual namun tidak sesuai format dan tidak ada catatan atas nilai yang diberikan. - TLHP belum 100%
12	Pengadilan Negeri Suka Makmue	- LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen; - Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
13	Pengadilan Negeri Tegal	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
14	Pengadilan Negeri Airmadidi	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
15	Pengadilan Negeri Amurang	- Laporan Survey TW I (Januari-Maret) tidak sesuai format (SE Menpan No.4 Tahun 2023) - TLHP belum 100%
16	Pengadilan Negeri Atambua	- LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen - Terdapat Aparatur yang belum menyampaikan LHKPN - Tidak ada Laporan SPKP dan SPAK sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas

17	Pengadilan Negeri Batam	<ul style="list-style-type: none"> - LKE Manual belum ada nilai, belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak mencantumkan tautan data dukung - Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga belum sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
18	Pengadilan Negeri Batulicin	Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga belum sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
19	Pengadilan Negeri Baturaja	LKE Manual tidak bisa diakses (dibuka)
20	Pengadilan Negeri Batusangkar	LKE menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen
21	Pengadilan Negeri Bukittinggi	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan pada setiap sub komponen
22	Pengadilan Negeri Cilacap	Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
23	Pengadilan Negeri Demak	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan pada setiap sub komponen
24	Pengadilan Negeri Gresik	<ul style="list-style-type: none"> - LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung - Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024
25	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024 dan laporan survei diterbitkan 1 April 2024 sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
26	Pengadilan Negeri Karawang	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan seluruh sub komponen diberi nilai sempurna sehingga nilai total 100

27	Pengadilan Negeri Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> - LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung; - Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga belum sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
28	Pengadilan Negeri Kayuagung	<ul style="list-style-type: none"> - LKE PMPZI dan tidak ada tautan data dukung - Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024 dan laporan survei diterbitkan Maret 2024 sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
29	Pengadilan Negeri Kisaran	<p>Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024 dan laporan survei diterbitkan Maret 2024 sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas</p>
30	Pengadilan Negeri Koba	<ul style="list-style-type: none"> - LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
31	Pengadilan Negeri Kota Agung	<ul style="list-style-type: none"> - LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id. - Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024 dan laporan survei diterbitkan Maret 2024 sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
32	Pengadilan Negeri Kotabumi	<ul style="list-style-type: none"> - LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id. - Tidak ada laporan SPKP dan SPAK
33	Pengadilan Negeri Kotamobagu	<ul style="list-style-type: none"> - LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen

34	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> - LKE menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen; - Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
35	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	<ul style="list-style-type: none"> - LKE menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen; - Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024
36	Pengadilan Negeri Kuningan	<ul style="list-style-type: none"> - LKE PMPZI tanpa ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen; - Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
37	Pengadilan Negeri Labuha	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
38	Pengadilan Negeri Lahat	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung
39	Pengadilan Negeri Lembata	<ul style="list-style-type: none"> - LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung - Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
40	Pengadilan Negeri Lhoksukon	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung

41	Pengadilan Negeri Liwa	- LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen - Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
42	Pengadilan Negeri Magetan	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
43	Pengadilan Negeri Majalengka	LKE Manual, namun tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada sub setiap sub komponen.
44	Pengadilan Negeri Marabahan	Tidak ada laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, namun terdapat Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
45	Pengadilan Negeri Marisa	- LKE PMPZI tanpa ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen; - Laporan Survei (SPAK dan SPKP) disahkan April 2024 sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
46	Pengadilan Negeri Masohi	- LKE Manual, namun tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada sub setiap sub komponen; - Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas. Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).
47	Pengadilan Negeri Mataram	LKE Manual, namun tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada sub setiap sub komponen.
48	Pengadilan Negeri Mempawah	LKE Manual, namun tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada setiap sub komponen.
49	Pengadilan Negeri Menggala	- LKE Manual, namun tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada setiap sub komponen. - Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas. Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

50	Pengadilan Negeri Mentok	- LKE Manual namun belum terdapat catatan atau penjelasan keterangan pada setiap sub area
51	Pengadilan Negeri Metro	- LKE Manual, namun pada Area Pengungkit (Reform) dan Area Hasil tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada sub setiap sub area tersebut - Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas. Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).
52	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	- LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen; - SPKP dan SPAK hanya berupa tampilan website dan ringkasan laporan yang tidak lengkap - Survei tidak sesuai format kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas (hanya dokumen tampilan nilai di website)
53	Pengadilan Negeri Padang Panjang	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
54	Pengadilan Negeri Palangkaraya	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen
55	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen
56	Pengadilan Negeri Paringin	LKE Manual, namun tidak ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikan nilai pada setiap sub komponen.
57	Pengadilan Negeri Pasarwajo	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
58	Pengadilan Negeri Pematang Siantar	- LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen - TLHP belum 100%
59	Pengadilan Negeri Penajam	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen

60	Pengadilan Negeri Poso	Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
61	Pengadilan Negeri Prabumulih	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
62	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	LKE Manual namun belum terdapat link eviden dan catatan/penjelasan keterangan pada setiap sub area
63	Pengadilan Negeri Purwokerto	- LKE Manual tidak sesuai format dan belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen; - Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas. SPKP dilaksanakan Triwulan II Tahun 2024 namun SPAK dilaksanakan Triwulan I Tahun 2024 dengan dasar survei yang tidak sesuai ketentuan. - TLHP belum 100%
64	Pengadilan Negeri Ranai / Pengadilan Negeri Natuna	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
65	Pengadilan Negeri Rantau	- LKE tidak sesuai format - Tidak ada laporan hasil survei
66	Pengadilan Negeri Rengat	Tidak ada laporan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan pekan survei tidak sesuai kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
67	Pengadilan Negeri Sekayu	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen
68	Pengadilan Negeri Semarang	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak didukung dengan link eviden;
69	Pengadilan Negeri Sengkang	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
70	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan yang diberikannya nilai pada setiap sub komponen serta belum didukung link eviden pada Area Reform dan Area Hasil
71	Pengadilan Negeri Sibolga	- Pelaksanaan Survei Tahun 2023 - LKE Manual namun belum terdapat

		catatan/penjelasan pada setiap sub komponen
72	Pengadilan Negeri Simalungun	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan yang diberikannya nilai pada setiap sub komponen
73	Pengadilan Negeri Singaraja	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id .
74	Pengadilan Negeri Sleman	Laporan SPKP tidak sesuai format (Laporan SKM)
75	Pengadilan Negeri Tahuna	TLHP belum 100%
76	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung
77	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	- LKE menggunakan LKE dari PMPZI - SPAK dan SPKP hanya berupa publikasi atas hasil survei
78	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	- LKE tidak sesuai format - Laporan SPKP tidak sesuai format (Laporan SKM)
79	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	- LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan dan link eviden diberikannya nilai pada setiap sub komponen - Tidak ada laporan hasil survei SPKP
80	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen (tidak sesuai format)
81	Pengadilan Negeri Ternate	- LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada komponen Hasil - TLHP belum 100%
82	Pengadilan Negeri Tilamuta	Laporan SPKP tidak sesuai format (Laporan SKM)
83	Pengadilan Negeri Tobelo	- LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen - Pekan survei tidak sesuai kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas - TLHP belum 100%
84	Pengadilan Negeri Tondano	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
85	Pengadilan Negeri Waikabubak	- LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen - Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas.

86	Pengadilan Negeri Wonosobo	- LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen - TLHP belum 100%
----	----------------------------	--

2.a. Peradilan Agama - Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024, , tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
2	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	Laporan Survei berupa Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi, sehingga tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

2.b. Peradilan Agama - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon	Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024
2	Mahkamah Syar'iyah Sigli	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
3	Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan	- Laporan survei tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024. - TLHP belum 100%
4	Pengadilan Agama Banggai	- LKE tidak sesuai format
5	Pengadilan Agama Banjarnegara	- Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga laporan survei tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
6	Pengadilan Agama Bantaeng	Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024
7	Pengadilan Agama Barru	- LKE belum diberikan nilai dan catatan/ penjelasan/ keterangan pada setiap sub komponen - Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024, tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
8	Pengadilan Agama Bengkalis	- LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id - Laporan survei tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun

		2024.
9	Pengadilan Agama Kangean	Tidak ada Laporan Hasil Survei (SPAK dan SPKP) sesuai format namun hanya informasi hasil survei
10	Pengadilan Agama Kisaran	Tidak ada dokumen Laporan SPAK dan SPKP, hanya ada Laporan SKM sehingga tidak sesuai format SE Menpan No 4 Tahun 2023 dan e-survey Dirjen Badilag
11	Pengadilan Agama Klaten	Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024 (Survei diterbitkan tanggal 5 April 2024)
12	Pengadilan Agama Majene	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id .
13	Pengadilan Agama Malili	Survey Triwulan I, namun di luar pekan survei sebagaimana surat edaran dari Dirjen Badilag (laporan tertanggal 28 Maret 2024)
14	Pengadilan Agama Manokwari	Tidak terdapat Laporan Survei IPAK.
15	Pengadilan Agama Masamba	TLHP belum 100%
16	Pengadilan Agama Masohi	Pelaksanaan Survei IPAK tidak sesuai dengan pekan survei dari Badilag, pada survei IPKP tidak terdapat tanggal pelaksanaan survei. Namun keseluruhan survei sudah melampirkan hasil survei Triwulan II.
17	Pengadilan Agama Muara Enim	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret), tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
18	Pengadilan Agama Natuna	Periode survei 2023 dan hanya memuat Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
19	Pengadilan Agama Negara	Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan periode laporan survei (IKM dan IPAK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret) yang disahkan 28 Maret 2024, sehingga tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
20	Pengadilan Agama Nganjuk	Tidak terdapat Laporan Survei (IPKP dan IPAK).
21	Pengadilan Agama Pangkajene	- LKE Manual namun tidak dilengkapi dengan catatan penjelasan dan tautan data dukung; - Laporan Survei Triwulan IV tahun 2023.
22	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id .
23	Pengadilan Agama Pariaman	- LKE Manual namun catatan penjelasan diisi tautan data dukung - Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan periode laporan survei (IKM dan IPK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret) yang disahkan 29 Maret 2024, sehingga tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas

		Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
24	Pengadilan Agama Pasarwajo	Tidak terdapat Laporan Survei IPAK.
25	Pengadilan Agama Polewali	Catatan pada LKE tidak diisi
26	Pengadilan Agama Ponorogo	Link data dukung pada LKE tidak dapat diakses
27	Pengadilan Agama Pontianak	LKE Manual namun seluruh catatan penjelasan pada setiap sub komponen diisi "dokumen/eviden tersedia" sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut
28	Pengadilan Agama Sanggau	LKE yang dilampirkan LKE PMPZI bukan LKE Manual
29	Pengadilan Agama Selong	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret), tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
30	Pengadilan Agama Simalungun	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret), tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024 karena surat pengantar tertanggal 28 Maret 2024 dan tidak ada informasi terkait jadwal pelaksanaan survei.
31	Pengadilan Agama Sinjai	LKE yang dilampirkan LKE PMPZI bukan LKE Manual
32	Pengadilan Agama Sintang	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id .
33	Pengadilan Agama Soasio	LKE Manual namun tidak dilengkapi dengan catatan penjelasan dan tautan data dukung
34	Pengadilan Agama Soe	Catatan pada LKE tidak diisi
35	Pengadilan Agama Stabat	Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
36	Pengadilan Agama Taliwang	Laporan Survei dokumen tidak ada dilampirkan.
37	Pengadilan Agama Tanah Grogot	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret), tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
38	Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun	- LKE Manual namun tidak dilengkapi dengan catatan penjelasan; - Tidak terdapat Laporan Survei.
39	Pengadilan Agama Tanjung Selor	LKE Manual namun seluruh Catatan/Keterangan/Penjelasan tidak terisi
40	Pengadilan Agama Tegal	Laporan Survei Triwulan IV tahun 2023
41	Pengadilan Agama Teluk Kuantan	Catatan pada LKE tidak diisi
42	Pengadilan Agama Watansoppeng	- LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen - TLHP belum 100%

43	Pengadilan Agama Wates	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id.
----	------------------------	---

3. Peradilan Militer - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	Catatan pada LKE tidak diisi/kosong
2	Pengadilan Militer I-04 Palembang	- LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id - Tidak ada laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, namun terdapat Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
3	Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	- LKE Manual namun tidak seluruh Catatan/Keterangan/Penjelasan terisi lengkap; - Periode survei (IPKP dan IPAK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret), tidak sesuai edaran Dirjen Badilmiltun Nomor 1115/DJU/OT1.6./IV/2024 tentang Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas.

4.a. Peradilan Tata Usaha Negara - Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	- LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen - Tidak ada laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, namun terdapat Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

4.b. Peradilan Tata Usaha Negara - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	LKE Manual namun tidak disertai dengan catatan;
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	TLHP belum 100%
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret), tidak sesuai edaran Dirjen Badilmiltun Nomor 1115/DJU/OT1.6./IV/2024 tentang Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas.
4	Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	LKE Manual namun tidak disertai dengan catatan dan tautan data dukung tidak dapat diklik;
5	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	LKE Manual namun tidak disertai dengan catatan dan tautan

Jakarta, 03 September 2024

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,

Ditandatangani Secara Elektronik



Sugiyanto

Lampiran II
Pengumuman Nomor: 1087/BP/PW.1.1.1/IX/2024
Tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) secara Mandiri Tahun 2024

TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
UNTUK UNIT KERJA YANG TIDAK LULUS

No	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Waktu
1	Tidak Lulus	Surat sanggahan setidaknya memuat nama unit kerja, alasan sanggah, dan bukti dukung yang valid (contoh surat sanggah ada pada Lampiran IV) melalui tautan: https://bit.ly/SanggahWBK2024	Paling Lambat 6 September 2024

Jakarta, 03 September 2024
Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,

Ditandatangani Secara Elektronik



Sugiyanto

Lampiran III
Pengumuman Nomor : 1087/BP/PW.1.1.1/IX/2024
Tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) secara Mandiri Tahun 2024

CONTOH SURAT SANGGAH

Nomor : *(Nomor Surat)* *(Tanggal Surat)*
Lampiran : *(Sejumlah berkas yang disampaikan)*
Hal : Pengajuan Sanggah atas Hasil Seleksi Administrasi
Zona Integritas Tahun 2024

Yth.
Koordinator Tim Penilai Internal
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Di
Jakarta

Sehubungan dengan Pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri, kami telah menerima pengumuman Nomor .../BP/PW1.1.1/8/2024 mengenai Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri Tahun 2024. Berdasarkan pengumuman tersebut, kami sampaikan untuk unit kerja yang dinyatakan TIDAK LULUS sebagai berikut:

Nama Unit Kerja	Keterangan TIDAK LULUS	Alasan Sanggah

Demikian kami sampaikan surat sanggahan ini dengan sebenarnya. **Bukti dukung** dari sanggah tersebut kami sampaikan di dalam lampiran surat ini. Kami mohon agar Tim Penilai Internal dapat melakukan evaluasi atas unit kerja tersebut.
Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, September 2024
Pimpinan Unit Kerja

(Nama)
NIP.

Tembusan: